

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJKN DKI JAKARTA
KPKNL JAKARTA II

LAPORAN KEUANGAN
Audited
Tahun Anggaran
2025

KPKNL JAKARTA II

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 05 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
MAYA SARTIKA

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	5
III. Laporan Operasional.....	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	9
A. Penjelasan Umum.....	9
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	22
D. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	25
E. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	28
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	30
Lampiran	



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAKARTA II**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NO.10 JAKARTA PUSAT 10410
TELEPON: (021) 34835237; FAKSIMILE: (021) 34835131; SITUS: www.djkn.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 05 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
MAYA SARTIKA

Laporan Keuangan KPKNL Jakarta II Tahun Anggaran 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai 31 Desember 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 41.175.449.047 atau mencapai 144,45% persen dari total estimasi (anggaran) Pendapatan-LRA tahun 2025 sebesar Rp 28.505.032.000.

Realisasi Belanja Negara sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.620.363.448 atau mencapai 79.24 persen dari total alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.306.992.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset sampai dengan Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.561.077.352 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.167.653.686, Aset Tetap (netto) sebesar Rp1.393.121.166, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.148.327.476 dan Rp2.561.077.352.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban operasional, surplus/ defisit dari kegiatan operasional, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/ defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.159.345.090, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp2.937.437.201 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp38.221.907.889. Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp8.840.000 dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp0 (tidak ada) sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp38.230.747.889.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.642.511.886 ditambah Surplus-LO sebesar Rp38.230.747.889, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp38.460.509.889) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.412.749.876.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 Audited menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK Periode Tahun Anggaran 2025 adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Triwulan II Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Pendapatan Perpajakan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Pajak Dalam Negeri	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pajak Perdagangan Internasional	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28,505,032,000.	41,175,449,047.	12,670,417,047.	144.4 5	19,866,236,000.	32,521,139,790.	12,654,903,790.	163.7
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Pendapatan BLU	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	28.505.032.000,	41,175,449,047.	12,670,417,047.	144.4 5	19.866.236.000,	32,521,139,790.	12,654,903,790.	163.7
III. Pendapatan Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	28.505.032.000,	41,175,449,047	12,670,417,047	144.4 5	19.866.236.000,	32,521,139,790.	12,654,903,790.	163.7
B. Belanja Negara	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,306,992,000.	2,620,363,448.	(686,628,552.)	79.24	3.498.744.000,	3,242,907,097.	(255,836,903.)	92.69
1. Belanja Pegawai	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Belanja Barang	3,078,660,000.	2,506,548,256.	(572,111,744.)	81.42	2.706.778.000,	2,478,868,527.	(227,909,473.)	91.58
3. Belanja Modal	228,332,000.	113,815,192.	(114,516,808.)	49.85	791.966.000,	764.038.570.	(27,927,430.)	96.47
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
5. Belanja Subsidi	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,

6. Belanja Hibah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
7. Belanja Bantuan Sosial	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
8. Belanja Lain-lain	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
II. Transfer ke Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
1. Dana Bagi Hasil	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
2. Dana Alokasi Umum	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
3. Dana Transfer Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
c. Hibah Kepada Daerah	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
4. Dana Otonomi Khusus	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
6. Dana Desa	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
7. Insentif Fiskal	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,306,992,000.	2,620,363,448.	(686,628,552.)	79.24	3,498,744,000.	3,242,907,097.	(255,836,903.)	92.69
C. PEMBIAYAAN	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0,

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II NERACA PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,148,327,476	2,598,161,717	(1,449,834,241)	(55.80)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	7,263,957	(7,263,957)	(100.00)
Persediaan	19,326,210	48,956,550	(29,630,340)	(60.52)
JUMLAH ASET LANCAR	1,167,653,686	2,654,382,224	(1,486,728,538)	(56.01)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	4,079,914,390	4,166,955,123	(87,040,733)	(2.09)
Aset Tetap Lainnya	3,263,752	3,263,752	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,690,056,976)	(2,582,206,276)	(107,850,700)	4.18
JUMLAH ASET TETAP	1,393,121,166	1,588,012,599	(194,891,433)	(12.27)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	279,492,625	151,436,904	128,055,721	84.56
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(279,190,125)	(151,436,904)	(127,753,221)	84.36
JUMLAH ASET LAINNYA	302,500	0	302,500	
JUMLAH ASET	2,561,077,352	4,242,394,823	(1,681,317,471)	(39.63)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,148,327,476	2,599,882,937	(1,451,555,461)	(55.83)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,148,327,476	2,599,882,937	(1,451,555,461)	(55.83)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,148,327,476	2,599,882,937	(1,451,555,461)	(55.83)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,412,749,876	1,642,511,886	(229,762,010)	(13.99)
JUMLAH EKUITAS	1,412,749,876	1,642,511,886	(229,762,010)	(13.99)
JUMLAH EKUITAS	1,412,749,876	1,642,511,886	(229,762,010)	(13.99)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,561,077,352	4,242,394,823	(1,681,317,471)	(39.63)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	NaN
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	NaN
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	NaN
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	NaN
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	NaN
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	NaN
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	NaN
Pendapatan Cukai	0	0	0	NaN
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	NaN
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	NaN
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	NaN
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	NaN
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	NaN
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	NaN
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	NaN
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	41,159,345,090	32,429,036,644	8,730,308,446	26.921
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	NaN
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	41,159,345,090	32,429,036,644	8,730,308,446	26.921
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	NaN
Pendapatan Hibah	0	0	0	NaN
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	NaN
Jumlah Pendapatan	41,159,345,090	32,429,036,644	8,730,308,446	26.921
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	NaN
Beban Pegawai	0	0	0	NaN
Beban Persediaan	148,368,150	117,236,250	31,131,900	26.555
Beban Barang dan Jasa	1,213,415,764	1,068,499,670	144,916,094	13.563
Beban Pemeliharaan	201,381,533	260,350,303	(58,968,770)	(22.65)
Beban Perjalanan Dinas	971,291,929	989,123,032	(17,831,103)	(1.803)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	NaN

Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	NaN
Beban Subsidi	0	0	0	NaN
Beban Hibah	0	0	0	NaN
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	NaN
Beban Penyusutan dan Amortisasi	402,979,825	202,958,445	200,021,380	98.553
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	NaN
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	NaN
Beban Lain-Lain	0	0	0	NaN
JUMLAH BEBAN	2,937,437,201	2,638,167,700	299,269,501	11.344
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	38,221,907,889	29,790,868,944	8,431,038,945	28.301
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	NaN
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	8,248,000	91,429,000	(83,181,000)	(90.979)
Pendapatan Pelepasan Aset	8,248,000	91,429,000	(83,181,000)	(90.979)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	NaN
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	NaN
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	NaN
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	NaN
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	592,000	0	592,000	Infinity
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	592,000	0	592,000	Infinity
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	NaN
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	8,840,000	91,429,000	(82,589,000)	(90.331)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	38,230,747,889	29,882,297,944	8,348,449,945	27.938
POS LUAR BIASA	0	0	0	NaN
Beban Luar Biasa	0	0	0	NaN
POS LUAR BIASA	0	0	0	NaN
SURPLUS/DEFISIT - LO	38,230,747,889	29,882,297,944	8,348,449,945	27.938

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,642,511,886	493,388,635	1,149,123,251	232.9
SURPLUS/DEFISIT-LO	38,230,747,889	29,882,297,944	8,348,449,945	27.94
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(38,460,509,899)	(28,733,174,693)	(9,727,335,206)	33.85
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(229,762,010)	1,149,123,251	(1,378,885,261)	(119.99)
EKUITAS AKHIR	1,412,749,876	1,642,511,886	(229,762,010)	(13.99)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPKNL Jakarta II

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II merupakan salah satu unit vertikal DJKN yang berada di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Melalui peran tersebut diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II berkomitmen dengan visi DJKN ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 per 31 Desember 2025 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah berdasarkan SE-17/MK.1/2015 (15 Jenis Penerimaan), sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non

- eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
- 2) Penerimaan atas Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
 - 3) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian (setoran SSBP menggunakan MAP 423293);
 - 4) Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
 - 5) Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
 - 6) Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423999);
 - 7) Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II (setoran SSBP menggunakan MAP 423292);
 - 8) Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 423227);
 - 9) Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli (setoran SSBP menggunakan MAP 423227) atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
 - 10) Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 423228);
 - 11) Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 423291);
 - 12) Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil (setoran SSBP menggunakan MAP 423291);
 - 13) Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 423998);
 - 14) Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang (setoran SSBP menggunakan MAP 423998);
 - 15) Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 423999)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs

tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. iSecara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	Triwulan IV Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28.505.032.000	41.175.449.047
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Estimasi Pendapatan	28.505.032.000	41.175.449.047
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	3.078.660.000	2.506.548.256
Belanja Modal	228.332.000	113.815.192
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Anggaran Belanja	3.306.992.000	2.620.363.448

Realisasi

Pendapatan

Rp14.519.529.130

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp41.175.449.047 atau mencapai 144,45% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28.505.032.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II terdiri dari Pendapatan Jasa II (Pendapatan Bea Lelang dan Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara) dan Pendapatan Jasa Lainnya (Pendapatan Jasa Lainnya dan Pendapatan Bea Lelang Pegadaian). Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Uraian	TRIWULAN IV T.A. 2025			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi Atas (Bawah) Anggaran	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28.505.032.000	41.175.449.047	12.670.417.047	144,45

Realisasi Belanja
Negara
Rp1.058.255.284

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Triwulan II T.A. 2025 adalah sebesar Rp1.058.255.284 atau 31,4% dari anggaran belanja sebesar Rp3.371.041.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Triwulan II T.A. 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Triwulan IV TA 2024

Uraian	Triwulan II TA 2025		Realisasi Atas (Bawah) Anggaran	%
	Anggaran	Realisasi		
Belanja				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang	3.078.660.000	2.506.548.256	(572.111.744)	81,4 2
Belanja Modal	228.332.000	113.815.192	(114.166.000)	49,8 5
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Anggaran Belanja	3.306.992.000	2.620.363.448	(686.628.552)	79,2 4

Belanja Pegawai
Rp0,-

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan II T.A. 2025 sebesar Rp0. Realisasi belanja Triwulan II T.A. 2025 terhadap anggaran sebesar 0 persen. Pembayaran terkait belanja pegawai dilaksanakan secara terpusat sejak bulan April 2021.

Realisasi Belanja Pegawai Triwulan Triwulan II T.A. 2025

URAIAN	ANGGARAN BELANJA TA 2025	REALISASI BELANJA TA 2025	REALISASI ANGGARAN %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0,00	0,00	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0,00	0,00	
Belanja Honorarium	0,00	0,00	
Belanja Lembur	0,00	0,00	-
Belanja Vakasi	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Bruto	0,00	0,00	-
Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	0,00	
Jumlah Belanja Netto	0,00	0,00	-

Belanja Barang
Rp1.058.255.284

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Triwulan IV T.A. 2025 sebesar Rp2.506.548.256. Realisasi Belanja Barang Triwulan IV T.A. 2025 terhadap anggaran sebesar 81,42%. Hal ini disebabkan antara lain karena program optimalisasi dan efisiensi belanja yang dilakukan oleh pemerintah pada seluruh Kementerian dan Pemerintah daerah pada tahun 2025.

Belanja Modal
Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Triwulan II T.A. 2025 adalah sebesar Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Triwulan II T.A. 2025

Uraian	Anggaran Belanja T.A. 2025	Realisasi Belanja TW II T.A. 2025	%
Belanja modal tanah	0	0	0
Belanja modal peralatan dan mesin	228.332.000	113.815.192	49, 85
Belanja modal gedung dan bangunan	0	0	0
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	0	0	0
Belanja modal lainnya	0	0	0
Jumlah belanja bruto	228.332.000	113.815.192	49, 85
Pengembalian	0	0	0
Jumlah belanja netto	228.332.000	113.815.192	49, 85

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara).

*Kas Lainnya dan Setara
Rp1.148.327.476*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.148.327.476 dan Rp2.598.161.717.

*Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0*

C.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp7.263.957.

*Persediaan
Rp19.326.210*

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp19.326.210 dan Rp48.956.550

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan	Triwulan IV T.A. 2025	Tahun Anggaran 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.148.327.476	2.598.161.717
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	7.263.957
Persediaan	19.326.210	48.956.550
Jumlah	1.167.653.686	2.654.382.224

*Peralatan dan Mesin
Rp4.079.914.390*

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp4.079.914.390 dan Rp4.166.955.123.

*Aset Tetap Lainnya
Rp3.263.752*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp3.263.752 dan Rp3.263.752. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang monografi (lukisan). Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Triwulan IV T.A. 2025. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp2.690.056.976*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing Rp2.690.056.976 dan Rp2.582.206.276. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Lain-Lain
Rp279.492.625*

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada KPKNL Jakarta II adalah Rp279.492.625 dan Rp151.436.904. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp279.190.125*

C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp279.190.125 dan Rp151.436.904 . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1.148.327.476*

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.148.327.476 dan Rp2.599.882.937. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Ekuitas
Rp1.148.327.476*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.148.327.476 dan Rp1.642.406.029. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp41.1598.345.090

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp41.1598.345.090 dan Rp32.429.036.644.

Pendapatan Jasa Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari uang jaminan lelang yang telah disetor ke rekening Bendahara Penerima, namun pada waktu yang telah ditentukan pemenang lelang tidak melunasi sehingga dinyatakan wanprestasi.

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada T.A. 2025 dan T.A. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai pada TA 2025 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena telah dilaksanakannya sentralisasi belanja pegawai sejak TA 2021, dimana pembayaran belanja pegawai dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN.

Beban Persediaan
Rp148.368.150

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Triwulan IV T.A. 2025 dan T.A. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp148.368.150 dan Rp117.236.250. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Triwulan IV T.A. 2025 dan T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Triwulan IV T.A. 2025	T.A. 2024	%
Beban persediaan konsumsi	148.368.150	117.236.250	26,55
Beban persediaan bahan baku			
Beban persediaan suku cadang			
Beban persediaan lainnya			
Jumlah beban persediaan	148.368.150	117.236.250	26,55

Beban Barang dan
Jasa
Rp1.213.415.764

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Triwulan IV T.A. 2025 dan T.A. 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.213.415.764 dan Rp1.068.499.670. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban
Pemeliharaan
Rp201.381.533

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Triwulan IV T.A. 2025 dan T.A. 2024 masing-masing sebesar Rp201.381.533 dan Rp260.350.303. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Triwulan IV T.A. 2025 dan T.A. 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Triwulan IV TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Triwulan IV TA 2025	T.A. 2024	%
Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	Rp0	Rp0	0
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp201.381.533	260.350.303	(58,97)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp0	Rp0	0
Jumlah	Rp201.381.533	260.350.303	(58,97)

Beban Perjalanan
Dinas
Rp971.291.929

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Triwulan IV T.A. 2025 dan T.A. 2024 masing-masing sebesar Rp971.291.929 dan Rp989.123.032. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terjadi peningkatan terkait beban perjalanan dinas di Triwulan IV T.A. 2025 karena Pemerintah telah melakukan buka blokir perjalanan dinas seluruh kementerian dan lembaga.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp402.979.825

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Triwulan IV T.A. 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp402.979.825 dan Rp202.958.445. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai

suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp8.840.000

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp 8.248.000 sdan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp 592.000 sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Triwulan IV T.A. 2025 sebesar Rp8.840.000.

Pos Luar Biasa Rp0

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa pada Triwulan IV T.A. 2025 sebesar Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
Rp1.642.511.886*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 masing-masing sebesar Rp1.642.511.886 dan Rp493.388.635.

*Surplus LO
Rp38.230.747.889*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.230.747.889 dan Rp29.882.297.944. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/ defisit kegiatan operasional, surplus/ defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Rp0*

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

*Penyesuaian Nilai
Aset
Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
(Rp38.460.509.899)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp38.460.509.899) dan (Rp28.733.174.693). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Ekuitas Akhir
Rp1.412.749.876*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.412.749.876 dan Rp1.642.511.886.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

LAMPIRAN